

**PERSEPEKTIF HUKUM PROGRESIF TENTANG EKSEKUSI  
PUTUSAN GUGATAN REKONPENSI HARTA BERSAMA  
DALAM PERKARA CERAI TALAK  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.)  
DI PENGADILAN AGAMA PATI**

**T E S I S**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Magister  
Program Magister Ilmu Hukum**



**Diajukan oleh:  
M.ARWANI  
2016 02 006**

**Kepada  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
2018**

**Halaman Persetujuan Sesudah Tesis diuji**

**PERSEPEKTIF HUKUM PROGRESIF TENTANG EKSEKUSI  
PUTUSAN GUGATAN REKONPENSI HARTA BERSAMA  
DALAM PERKARA CERAI TALAK  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.)  
DI PENGADILAN AGAMA PATI**

**Diajukan oleh:**

**M. ARWANI**

**2016 02 006**


**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Magister pada Program Magister Ilmu Hukum**

**Pembing Utama**



**Dr. SUKRESNO, S.H., M.Hum.**

**Anggota Dewan Penguji I**



**Dr. HIDAYATULLAH, S.H., M.Hum**

**Pembimbing Pendamping**



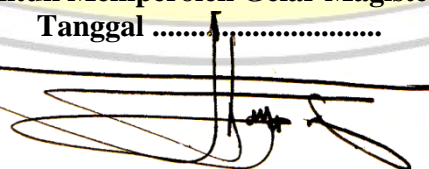
**Dr. SUBARCAH, S.H., M.Hum.**

**Anggota Dewan Penguji II**



**Dr. ISKANDAR WIBAWA, S.H., M.Hum.**

**Tesis Ini Telah Diterima Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Tanggal .....**

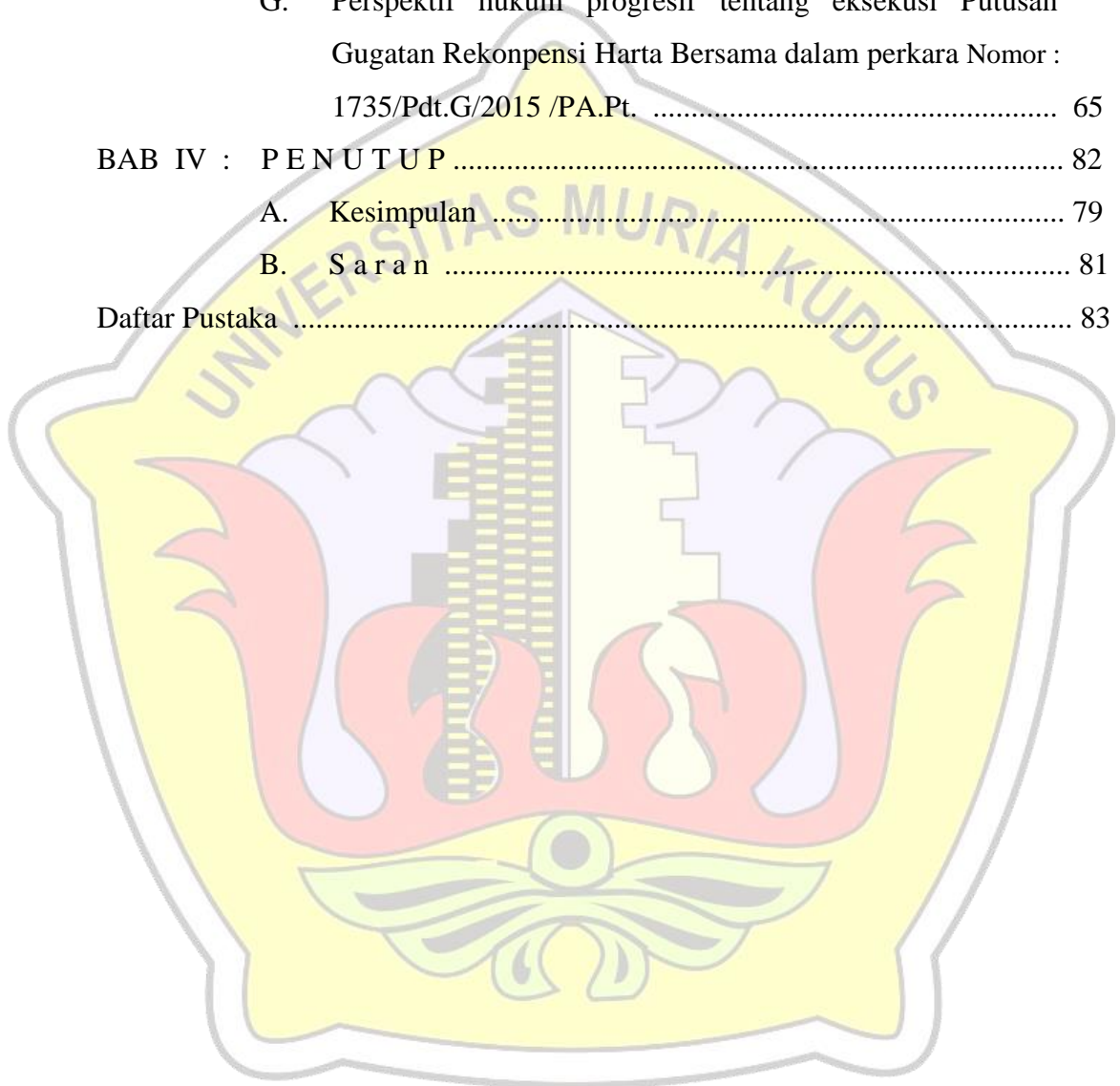


**Dr. HIDAYATULLAH, S.H., M.Hum**  
**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SEBELUM TESIS DIUJI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SETELAH TESIS DIUJI .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....	vii
ABSTRAK BAHASA ENGGRIS .....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Pengertian Perspektif Hukum Progresif .....	18
B. Tentang Eksekusi Putusan .....	26
C. Gugatan rekonsensi .....	35
D. Harta Bersama .....	39
E. Cerai Talak .....	40
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Profil Pengadilan Agama Pati .....	43
B. Putusan Perkara Cerai Talak Yang Digugurkan Setelah Berekuatan Hukum Tetap Akibat Gugatan Rekonsensi Dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pati.....	45
C. Analisis Kesamaan dan Perbedaan Diantara 3(tiga) Putusan Perkara Cerai Talak Yang Gugur Setelah Berkekuatan Hukum Tetap.....	53
D. Perkembangan Putusan Gugatan Rekonsensi Harta Bersama Perkara Cerai Talak Nomor 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt. setelah berkekuatan hukum tetap.....	55

E.	Dasar Hukum Putusan Gugatan Rekonpensi Harta Bersama Perkara Cerai Talak Nomor : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt. di Pengadilan Agama Pati, tidak dapat dilakasakan. ....	58
F.	Langkah Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Isteri / Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi, Agar Dapat Memperoleh Hak Atas Harta Bersama. ....	60
G.	Perspektif hukum progresif tentang eksekusi Putusan Gugatan Rekonpensi Harta Bersama dalam perkara Nomor : 1735/Pdt.G/2015 /PA.Pt. ....	65
BAB IV : P E N U T U P .....		82
A.	Kesimpulan .....	79
B.	S a r a n .....	81
Daftar Pustaka .....		83





## HALAMAN PERNYATAAN UNTUK TESIS SETELAH DIUJI

### PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Arwani

NIM : 2016-02-006

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Kudus, Maret 2019

Yang membuat pernyataan

**M. Arwani**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas Ridha, Rahmat dan Karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat magister (Strata Dua).

Penulisan Tesis berjudul : "Persepektif Hukum Progresif Tentang Eksekusi Putusan Gugatan Rekonpensi Harta Bersama Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Nomor 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.) Di Pengadilan Agama Pati" ini Penulis dengan usaha sungguh-sungguh serta motivasi dan bimbingan berbagai pihak akhirnya dapat selesai.

Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S., Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, mengarahkan serta memberi petunjuk yang sangat berharga, sehingga penulisan Tesis ini dapat Penulis selesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Subarkah, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang telah pula membimbing, mengarahkan serta memberi petunjuk yang sangat berharga, sehingga penulisan Tesis ini dapat tersusun dengan baik.
5. Bapak Drs. H. Abdul Rozaq, M.H., Bapak Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Pati Kelas 1A., yang telah memberikan suport Penulis, mulai daftar kuliah hingga penyelesaian tesis ini.
6. Bapak-ibu Dosen Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, yang telah berkenan mentransfer ilmu yang bermanfaat kepada Penulis.
7. Seluruh Staf Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, yang telah mendukung Penulis dengan baik selama kuliah hingga menyelesaikan Tesis ini.
8. Bapak Kepala Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan Ibu Anik Sudarwati, S.H., yang telah membantu memberikan informasi data yang Penulis perlukan dalam penyusunan Tesis ini.
9. Isteri dan anak-anak tercinta yang telah mendukung dan menyemangati Penulis sejak niat kuliah hingga penyelesaian Tesis ini.

Kepada semuanya Penulis berdo'a, semoga amal dan jasa yang sangat baik itu di terima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai amal shalih dan diberi-Nya imbalan yang terbaik, amiin ya Robbal-'alamin.

Akhirnya Penulis menyadari, bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Penulis berharap tesis ini sebagai bahan pemikiran untuk disempurnakan lagi, yang setidak-tidaknya dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk dikembangkan lagi dalam ilmu pengetahuan selanjutnya.

Pati, Pebruari 2019

Penulis

## ABSTRAK

### Persepektif Hukum Progresif Tentang Eksekusi Putusan Gugatan Rekonpensi Harta Bersama Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Nomor : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.) Di Pengadilan Agama Pati.

Kaum perempuan di Indonesia pada dasarnya mendapat perhatian istimewa, berbagai Peraturan Perundang-undangan banyak telah berpihak kepadanya, namun demikian ternyata masih ada yang terkendala di hadapan hukum, antara lain dalam perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama, Isteri berhak mengajukan gugatan rekonpensi pembagian Harta Bersama, namun setelah putus dikabulkan dan Putusan telah berkekuatan hukum tetap, ternyata Putusan tersebut gugur karena Suami tidak jadi mengucapkan ikrar talak, sehingga putusan gugatan rekonpensi ikut menjadi gugur pula, Putusan semacam ini adalah terdapat masalah, yakni tidak sejalan dengan azas : kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Oleh karena itu perlu ada temuan hukum sebagai terobosan secara progresif tanpa menyimpangi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi justru mendukung dan memberi kontribusi terhadap kepentingan hukum, Disinilah Penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas, dengan harapan dan tujuan dapat memberi solusi terhadap Isteri yang sedang berhadapan dengan hukum dalam kasus seperti tersebut diatas, serta dapat memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan hukum, dengan metode penelitian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para pakar ilmu hukum, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian Penulis melakukan survey pula pada putusan perkara Cerai talak Nomor: 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt. di Pengadilan Agama Pati dan perkembangannya setelah berkekuatan hukum tetap.

Setelah Penulis hubungkan antara teori dan kasus, ternyata Penulis mendapatkan temuan bahwa Gugatan Rekonpensi Harta Bersama, seharusnya tidak gugur bersama gugurnya perkara konpensi Cerai Talak, karena gugatan tersebut adalah asli perkara kontensius, yang amar putusannya bersifat kondemnatoir, kemudian bila diajukan gugatan baru termasuk gugatan "*nebis in idem*", sedangkan perkara Cerai talak aslinya adalah perkara voluntair dan amarnya bersifat diklaratoir, kemudian setelah putusan gugur dapat diajukan lagi tanpa mengenal "*nebis in idem*", kemudian perkembangan kehidupan antara suami isteri ternyata tetap tidak bisa rukun kembali, keduanya hidup saling berpisah dan saling membiarkan.

Berdasarkan urian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa putusan gugatan rekonpensi harta bersama yang telah berkekuatan hukum tetap, tetaplah berlaku secara sah sepanjang masa, tidak gugur bersama gugurnya putusan perkara cerai talak yang Pemohonnya tidak jadi mengucapkan ikrar talak, maka selanjutnya putusan gugatan rekonpensi harta bersama tersebut dapat dilaksanakan atau eksekusi.

Kepada Isteri dalam perkara a quo, bila masih berkepentingan terhadap harta berseama tersebut disarankan untuk mengajukan permohonan eksekusi dan kepada Pengadilan Agama Pati disarankan untuk mengabulkan permohonan eksekusi tersebut.

**KATA KUNCI** : Perkara Cerai talak, gugatan rekonpensi harta bersama, putusan gugur, hadir hukum progresif.



## **ABSTRACT**

### **Progressive Legal Perspectives on Execution of Decisions on Joint Treasure Reconstruction Claims in Divorce Cases (Case Study of Case Number :1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.) In Pati's Religious Court**

Women in Indonesia basically get special attention, many laws and regulations have been in favor of him, however it turns out that there are still those who are constrained before the law, among others in divorced cases in the Religious Court, the wife has the right to file a claim for the sharing of joint assets, but after the decision was granted and the verdict was legally binding, it turned out that the Decision was dropped because the Husband did not make a pledge of divorce, so the decision of the reconciliation lawsuit also fell. This kind of decision was a problem, which was not in line with principle: certainty, justice and expediency.

Therefore there needs to be legal findings as a progressive breakthrough without deviating from the prevailing laws and regulations, but instead it supports and contributes to legal interests, this is where the author tries to compile a thesis with the title as mentioned above, with the hope and purpose of providing solutions to the wife who are dealing with the law in a case like the one above, and can contribute to legal science, with the research method of the applicable legislation and the opinions of legal experts, which are related to the issues discussed, then the author also conducts surveys on divorce case Number: 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt. in Pati Religious Court and its development after permanent legal force.

After the author connected between theory and case, it turned out that the author found the Joint Treasury Reconciliation Actions should not fall with the death of the divorced divorce case, because the lawsuit was a controversial case original, which the decision was constitutional in nature, then if a new lawsuit was filed including a lawsuit "nebis in idem", while the original divorce case is a voluntary case and the rules are classified, then after the verdict can be submitted again without knowing" nebis in idem", then the development of life between husband and wife is still unable to get along again, both live separated and let each other.

Based on the description above, it can be concluded that the decision to reconcile the joint assets that have permanent legal force remains valid throughout the period, does not fall along with the death of the divorce divorce verdict which the Petitioner does not make a divorce pledge, then the decision to reclaim the joint assets can be executed or executed.

To the Wife in the a quo case, if she still has an interest in the same property, it is suggested that she submit a petition for execution and the Pati Religious Court to grant the request for execution.

**KEY WORDS** : Divorced divorce cases, claim of joint property reconciliation, decree decides, present progressive law.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Hasil survey di Pengadilan Agama Pati :  
Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abd Rozaq, M.H. (Ketua).  
Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Hartono, S.H. (Sekretaris)  
Wawancara dengan Bapak Tontowi, S.H. (Panitera)
- Lampiran 2 : Lembar Hasil survey Balai Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Wawancara dengan Bapak Supriyadi (Sekretaris Desa).
- Lampiran 3 : Lembar Hasil Survey / Wawancara dengan Ibu Anik Sudarwati, S.H. Kuasa Hukum Termohon Kompensi / Penggugat rekompensi perkara Nomor : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.
- Lampiran 4 : Fotokopi Putusan perkara Nomor : 2357/Pdt.G/2017/PA.Pt.
- Lampiran 5 : Fotokopi Penetapan perkara Nomor : 2357/Pdt.G/2017/PA.Pt.
- Lampiran 6 : Fotokopi Putusan perkara Nomor : 2703/Pdt.G/ 2017/PA.Pt.
- Lampiran 7 : Fotokopi Penetapan perkara Nomor : 2703/Pdt.G/ 2017/PA.Pt.
- Lampiran 8 : Fotokopi Putusan perkara Nomor : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.
- Lampiran 9 : Fotokopi Penetapan perkara Nomor : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.